

Tim Peneliti JPP Fisipol UGM

Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN



JPP
JURUSAN POLITIK &
PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM

Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman

TIM PENELITI

Fasilitator FGD

Mada Sukmajati, Muhammad Mahsun

Analisis data dan penyusunan laporan

Abdul Gaffar Karim, Ashari Cahyo Edi,
Desi Rahmawati, Ristyan Wideaswati

Jurusan Politik dan Pemerintahan

FISIPOL UGM

Research Centre for Politics and Government (PolGov)

Gd. BA FISIPOL UGM Lt. 4 R. BA 403. Jl. Sosio Yusticia Bulaksumur Yogyakarta 55281. No Telp:
0274- 552212; 555880; 563362 (ext. 150). Email: polgov@ugm.ac.id; polgov.ugm@gmail.com

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	2
METODE PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN	6
KERANGKA TEORI: LITERASI POLITIK	8
Definisi Literasi Politik	9
Elemen-elemen Literasi Politik	9
Urgensi Literasi Politik	10
Membentuk Masyarakat yang Literate secara Politik	11
Tantangan Literasi Politik	12
TEMUAN-TEMUAN	13
Pengguna Hak Pilih Secara Kuantitatif: Sekilas tinjauan secara umum	14
Kualitas Literasi Politik Penduduk Sleman: Temuan FGD	15
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik	16
Pendidik Pemilih yang Belum Efektif	18
Beberapa Usulan Rekomendasi yang Muncul dari FGD	22
Kesimpulan FGD	23
REKOMENDASI KEBIJAKAN	24
BIBLIOGRAFI	26

Pendahuluan

Pendahuluan

Hajatan demokrasi di Indonesia yang digelar tahun 2014 lalu menunjukkan tingginya partisipasi pemilih secara nasional. Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 75,11% pemilih tercatat menggunakan hak pilihnya (KOMPAS.com, 2014a). Angka ini meningkat dari periode pemilu 2009 yang mencatatkan 70,99% kehadiran pemilih, dan melampaui target Komisi Pemilihan Umum/KPU sebesar 75% (detikom, 2014a). Sementara itu pada Pemilu Presiden (Pilpres), walaupun mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya namun partisipasi pemilih masih tinggi yaitu sekitar 70% (KOMPAS.com, 2014b).

Senada dengan capaian di tingkat nasional, Kabupaten Sleman juga mencatatkan tingginya angka partisipasi pemilih. Kabupaten Sleman meraih angka partisipasi pemilih tertinggi di DIY. Pada Pilpres 2014 lalu 81,7% pemilih menggunakan hak pilihnya. Capaian ini lebih tinggi dari Kota Yogyakarta (77,15%), Kabupaten Bantul (81,3%), Kulonprogo (79,3%) dan Gunungkidul yang hanya 77,04% (HarianJogja.com, 2014a). Dalam pemilu legislatif 2014, angka partisipasi di Kabupaten Sleman bahkan mencapai 83,276%, melebihi capaian saat pemilu legislatif 2009 yang hanya sekitar 70% (HarianJogja, 2014b). Tidak hanya itu KPU Kabupaten Sleman selaku penyelenggara pemilu di kabupaten ini juga meraih penghargaan Terbaik I IKPU Award 2014 dalam kategori Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu (Kedaulatan Rakyat Online, 2014).¹

Namun demikian tingginya capaian partisipasi pemilih masih menyisakan skeptisisme pada banyak kalangan yang menilai bahwa realisasi demokrasi di Indonesia masih sebatas pada demokrasi prosedural, belum mencapai demokrasi substansial. Apakah capaian kuantitas tersebut mencerminkan kualitas demokrasi? Cukupkah kita memaknai demokrasi hanya dengan capaian angka?

Banyak ahli, aktivis, maupun peserta pemilu di Indonesia memberikancatatan khusus terhadap pemilu 2014 yang mengindikasikan kuatnya praktik politik uang; bagaimana pelanggaran pemilu dalam bentuk ini dipraktikkan secara terbuka di semua daerah dan level pemilihan. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie, misalnya, menyatakan bahwa praktik politik uang dilakukan secara massif (Republika Online, 2014a). Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyoroti praktik ini yang dilakukan secara terang-terangan dalam beragam bentuk seperti uang, amplop, dan kartu asuransi (KOMPAS.com, 2014c). Sementara itu Aspinall & Sukmajati tidak hanya mengelaborasi bentuk-bentuk praktik politik uang di lebih dari tiga puluh daerah namun juga mengkaitkannya dengan politik patronase yang ditengarai menjadi aspek sentral dalam strategi kampanye sebagian besar kandidat (Aspinall & Sukmajati 2015:10).

Meski politik uang mendominasi praktek pelanggaran kampanye pada pemilu 2014, pelanggaran lain juga penting dilihat dalam konteks kualitas elektoral. Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang mengungkapkan bahwa

¹ Penghargaan ini diperoleh melalui prestasi KPU Sleman dalam menggunakan media Ular Tangga Pemilu untuk mengenalkan pemilu pada kalangan pelajar.

media menyoroti beragam pelanggaran pemilu. Selain didominasi oleh politik uang (52%), pemilu lalu juga diwarnai dengan penggelembungan suara (18%), pemilu ulang atau pencoblosan ulang (12%), pelanggaran kode etik (9%), serta penghitungan ulang sebesar 9% (Republika Online, 2014b).²

Di Kabupaten Sleman, kasus pelanggaran pemilu juga banyak dilaporkan, walaupun bukti-buktinya sulit ditemukan, khususnya pelanggaran dalam bentuk politik uang. Misalnya seperti yang diutarakan oleh Ketua Panwaslu Sleman Sutoto Jatmiko bahwa pihaknya banyak menerima aduan atas maraknya “serangan fajar” di Sleman namun belum menemukan bukti (Republik Online, 2014c). Praktek pelanggaran pemilu tersebut sulit dihilangkan mengingat adanya *demand dan supply*. Disamping itu, pembuktian yang sulit akan mempengaruhi tidak tuntasnya dalam penyelesaian hukum.

Realitas di atas mengarah pada praktek pembajakan demokrasi yang terstruktur dan sistematis. Pemilu berkualitas memerlukan prakondisi yang baik dalam hal peserta pemilu (*contestant*), pemilih (*voter*), dan suara pemilih (*voice*). Terkait dengan pemilih (*voter*) atau semua warga negara yang memiliki hak pilih difasilitasi secara baik untuk menggunakan hak pilihnya. Dan, pada saat yang bersamaan tidak boleh orang yang tidak memiliki hak pilih difasilitasi sebagai pemilih. Sedangkan pemilih (*voice*) harus dipastikan bahwa suara pemilih memiliki makna dalam arti suara pemilih dicatat apa adanya tanpa ada manipulasi dan ditransfer ke dalam kursi sesuai mekanisme yang telah ditentukan (Sigit Pamungkas, 2010).

Dalam melihat kualitas pemilu, “preferensi politik” merupakan aspek penting. Afan Gaffar (1994: 34) dalam *Javanese Voters* melihat dua hal penting dalam pembentukan preferensi politik pemilih ketika pemilu; 1) kecenderungan munculnya pemilih patronase yakni pemilih yang mendasarkan pada pilihannya pada ketokohan dan figur tertentu, yang dianggap dapat mencitrakan dirinya sebagai pemimpin; 2) munculnya fenomena ABS (Asal Bapak Senang), yakni pemilih yang tidak memiliki rasionalitas dan hanya menjadi pemilih *follower* yang mengikuti pada suara mayoritas.

Partisipasi pemilu yang berkualitas, mensyaratkan adanya pemilih yang cerdas dan kritis. Hal tersebut akan terpenuhi jika pemilih melek politik. Heryanto (2012: 109) melihat substansi kekuatan literasi politik ada pada partisipasi politik warganegara yang kritis dan memberdayakan terkait dengan konsep-konsep pokok politik yang akan berdampak pada kehidupan warga. Literasi politik bukanlah semata konsep normatif, melainkan bauran antara pengetahuan, skill dan sikap politik.

Pemilih tidak hanya perlu mempunyai pengetahuan dan kesadaran melainkan juga bebas dari segala bentuk intimidasi dari berbagai pihak. Jika tidak, maka partisipasi pemilih hanya akan berhenti di kotak suara. Untuk menjaga kualitas demokrasi partisipasi pemilih diperlukan lebih dari sekedar mencoblos, melainkan juga peran serta dalam pengawasan demokrasi. Sehingga prosedur dan substansi demokrasi dapat terpenuhi dengan baik.

² Hasil teropong pemberitaan pengamanan pemilu yang telah dilakukan Indonesia Indicator (I2), lembaga riset berbasis piranti lunak Artificial Intelligence (AI) untuk menganalisis indikasi politik, ekonomi, sosial di Indonesia melalui pemberitaan (media mapping).

Demokrasi memiliki tantangan untuk menjadikan partisipannya melek politik. Oleh karenanya, pendidikan politik perlu diintensifkan agar pemilih dapat dikategorikan melek politik. Terlebih dengan adanya fakta bahwa di Kabupaten Sleman Angka partisipasi pemilih pemula yang mencapai 77.000 pemilih atau 10 persen dari total pemilih. Pemilih pemula merupakan segmen penting dalam pemilu. Menurut Nur Budi Hariyanto (2012: 130) preferensi pemilih pemula seringkali dinilai baru pada tahap penerimaan (akseptabilitas) dan belum sampai pilihan politik (elektabilitas).

Menyikapi hal tersebut, penyelenggara pemilu di Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas. Misalnya, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Politik KPU Sleman menyelenggarakan berbagai upaya pendidikan politik untuk pemilih pemula maupun beragam segmen masyarakat pemilih lainnya.¹ Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan amanat dari pasal 6 PKPU No. 5 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih maka KPU Sleman juga akan merintis desa melek politik (Kabar Kota, 2015) .

Kompleksitas permasalahan diatas telah mendorong Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM dan KPU Kabupaten Sleman untuk melakukan kajian terhadap aspek literasi politik (“melek politik”) di balik tingginya partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2014. Kami hendak memetakan secara umum tentang apakah tingginya partisipasi politik warga Sleman dalam Pemilu 2014 memang disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat yang tinggi atautkah karena ada hal lain? Bagaimana melek politik warga selama ini terbentuk? Faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya melek politik warga? Kebijakan apa saja yang perlu dirumuskan untuk meningkatkan melek politik warga?

Namun demikian, berbagai keterbatasan memaksa kami untuk membatasi lingkup penelitian ini; tidak dengan melakukan survey pada masyarakat pemilih, namun melakukan pemetaan umum berdasarkan pengetahuan dari aktor-aktor kunci yang kami nilai memiliki pengetahuan/ pemahaman yang cukup tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Sleman.

³ Untuk pemilih pemula misalnya dilakukan dengan menyelenggarakan Cerdas Cermat Pemilu di sekolah-sekolah SMA/ sederajat, baik sekolah inklusi maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Training of Trainer (ToT) terhadap guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Kabupaten Sleman. Selanjutnya lihat pada bagian D. Temuan-Temuan yang menyoroti ragam pendidikan politik yang telah dilakukan KPU Kabupaten Sleman.